

**MANAJEMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(PUPR) PROVINSI RIAU DALAM PEMBANGUNAN FLYOVER DI
PEKANBARU PADA TAHUN 2018**

Oleh : Firdaus Mardiyas

firdausmardiyas@gmail.com

Dosen Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Pekanbaru City is the capital of Riau Province. With a dense population in urban areas such as what happened in the city of Pekanbaru, the need for road access is increasing, roads are the main need for public access. Dense traffic flow will cause congestion because the number of roads does not match the number of vehicles available. To get around this, the Riau Provincial Government together with the Riau Province Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office built flyovers at points prone to congestion. There are two points that are considered to be experiencing severe congestion, especially during peak hours such as morning and evening, namely at the intersection of Pasar Pagi Arengka and the SKA Mall intersection. The Riau Provincial PUPR Office as the technical implementer of the construction flyover is responsible for the success of the development, for this reason, management is needed from the Riau Province PUPR Office so that development can be in accordance with the set targets.

This study aims to determine the management of the Riau Provincial PUPR Office in carrying out construction flyover in Pekanbaru City in 2018 and to find out the factors that affect the delay construction flyover in Pekanbaru City in 2018. The research location is in Pekanbaru City, namely the Riau Province PUPR Office. This research uses a qualitative approach. This type of research is descriptive. Data were collected through informants purposively. Data collection techniques using interviews and documentation.

The results of this study show that the management of the Riau Province PUPR Office in the implementation of construction flyover in the city of Pekanbaru in 2018 has not been running optimally, this can be seen from the delay in completing the flyover construction from a predetermined time. The delay in completing the flyover was caused by several factors such as program planning that did not run according to what had been determined, coordination of the government structure, namely there were still differences of opinion between the PPK and PPTK, and the flyover development management program where during the development process there were some raw materials arriving late so that it hinders the development process and cannot be completed in accordance with the predetermined time.

Keywords: Management, development flyover, Riau Province PUPR Office

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah Provinsi Riau yang bertanggung jawab atas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Dinas PUPR Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana Dinas PUPR ini mengatur segala urusan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dinas PUPR Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas PUPR Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan
- b. Pelaksana kebijakan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan administrasi
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jalan layang (*flyover*) adalah model jembatan yang melintas diatas jalan. Jalan layang (*flyover*) merupakan sarana yang penting dan wajib disediakan oleh pemerintah apabila kondisi jalan raya di suatu daerah tersebut menjadi sangat padat dan menimbulkan kemacetan.

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jalan layang (*flyover*) diselenggarakan antara lain adalah untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang dan

meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Hal tersebut menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang padat penduduknya, kepadatan penduduk di kota Pekanbaru yang terus meningkat juga memacu pertumbuhan dan pembangunan di kota Pekanbaru itu sendiri.

Kepadatan penduduk yang ada menyebabkan peningkatan pertumbuhan volume kendaraan seiring dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Peningkatan pertumbuhan volume kendaraan tersebut tidak sebanding dengan fasilitas jalan yang telah ada sehingga hal tersebut menimbulkan kepadatan arus lalu lintas dan kemacetan di jalan raya.

Kepadatan arus lalu lintas dan kemacetan yang terjadi cukup mengganggu dan menjadi kendala di kota-kota besar seperti di Pekanbaru, dan untuk mengatasinya Pemerintah telah memiliki perencanaan dan solusi untuk mengurangi kemacetan yang terjadi agar tidak semakin parah. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemacetan tersebut salah satunya dengan membangun *flyover* di persimpangan jalan.

TRIBUN NEWS

Pekanbaru, Tahun 2018
Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Rahmad Rahim menyebutkan kemacetan lalu lintas merupakan salah satu dampak dari perkembangan kota yang dialami Pekanbaru. "Pekanbaru itu macetnya terparah akhir pekan. Biasalah, orang-orang datang dari kabupaten dan kota,

bahkan provinsi tetangga, untuk berbelanja ke Pekanbaru,” ujar Rahmad Rahim kepada *Tribun*, Rabu (2/8/2017). Ia mengaku titik-titik kemacetan di kota Bertuah terjadi di jalan-jalan milik provinsi. Namun demikian, ia mengatakan permasalahan kemacetan bukan dilimpahkan kepada pemilik jalan. Melainkan bagaimana aparatur kota dalam melakukan penataan. Meski demikian, Pemprov Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan membangun dua jembatan layang (flyover) sebagai salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di Pekanbaru. Dua jembatan layang itu masing-masing akan dibangun di simpang Mal SKA dan persimpangan Pasar Pagi Arengka.¹

Hal tersebut membuktikan bahwa Pekanbaru mengalami kemacetan lalu lintas sebagai salah satu dampak kota yang sedang berkembang, dimana jalan-jalan yang sering terkena macet berada di jalan-jalan provinsi, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PUPR Provinsi Riau melaksanakan pembangunan flyover di beberapa titik rawan kemacetan di Pekanbaru.

Perencanaan pembangunan dua flyover tersebut telah direncanakan sejak tahun 2017, dimana DED (*detail engineering design*) sudah selesai dirancang dan pembuatannya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2017 dan anggaran pelaksanaan pembangunan dimasukkan kedalam APBD murni 2018.

NEWS DETIK.COM
Pekanbaru, Tahun 2018
mengatakan Pembangunan dua flyover

1

(<https://pekanbaru.tribunnews.com/2017/08/02/pemprov-riau-melakukan-pembangunan-fly-over-pekanbaru-2018>., diakses pada 14 November 2019 ,Pukul 15.12 WIB)

ini pertama di perempatan Jl. Soekarno Hatta dengan Jl. Tuanku Tambusai (Simpang SKA). Pemenang tendernya PT Sumber Sari Cipta Marga. Untuk flyover di kawasan SKA ini menelan dana sebesar Rp 159.384.265. 000. Pagu anggaran APBD tahun 2018. Flyover kedua di persimpangan Jl Soekarno-Hatta dengan Jl Adi Sucipto dan Subrantas di Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Lokasi kedua ini persisnya di Pasar Pagi Arengka dengan pemenang tender PT Dewanto Cipta Pratama. Anggaran yang digelontorkan lewat APBD 2018 ini mencapai Rp 78.398. 668.000. "Pelaksanaan proyek sudah dimulai dari sekarang. Waktu penyelesaiannya selama selama 10 bulan artinya selesai pada tahun 2018 ini," kata Dadang.². Untuk pagu anggaran APBD Provinsi Riau yang digunakan dalam pembangunan kedua flyover tersebut dapat digambarkan dalam matriks berikut.

Tabel 1.1 Matriks Anggaran Pembangunan Flyover di Kota Pekanbaru tahun 2018

No	Program	Tahun	Pagu Anggaran	Pelaksana Proyek
1.	Flyover Persimpangan SKA	2018	159.384.265.000	PT Sumber Sari Cipta Marga
2.	Flyover Pasar Pagi Arengka	2018	78.398.668.000	PT Dewanto Cipta Pratama

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Proyek ini merupakan proyek Dinas PUPR Provinsi Riau untuk satu tahun anggaran (*single year*) dimana pengerjaannya hanya 10 bulan, berbeda dengan pembangunan flyover

2 (<https://news.detik.com/berita/d-3913716/bangun-2-flyover-pemprov-riau-rogoh-apbd-seperempat-triliun-rupiah>. diakses pada 23 November 2019 Pukul 13.00 WIB)

sebelumnya yang merupakan proyek *multiyears* yaitu 14 hingga 16 bulan.

Mengingat proyek pembangunan *flyover* pekanbaru merupakan kawasan padat aktivitas dan kawasan akses kendaraan menuju ke dalam kota pekanbaru serta ke luar kota pekanbaru, sehingga pengerjaan proyeknya harus dikerjakan secepat mungkin agar tidak banyak efek kemacetan, ekonomi maupun sosial masyarakat yang ditimbulkan. Oleh karena itu Dinas PUPR Provinsi Riau memutuskan untuk melaksanakan proyek tersebut dalam waktu satu tahun anggaran (*single year*) dan menjadwalkan pembangunan dua *flyover* dikerjakan pada Maret 2018 setelah proses lelang yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pelelangan-Elektronik selesai.

Untuk pelaksanaan pembangunan dimulai pada April 2018 hal tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama (*groundbreaking*) pada proyek tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim melakukan peletakan batu pertama (*Groundbreaking*) pembangunan dua jalan layang (*flyover*) di simpang Mal SKA Jalan Tuanku Tambusai - Jalan Soekarno Hatta dan Pasar Pagi Arengka Jalan HR Soebrantas - Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Jumat (6/4/2018). Berjalan sesuai rencana, peletakan batu pertama ini dipusatkan pada satu titik saja, yakni di area pembangunan *flyover* simpang SKA. Fly over di kawasan SKA ini memiliki panjang 625 meter dengan lebar 18 meter. Nantinya ada dua jalur dengan masing-masing lebarnya 4 meter. Untuk fly over di Pasar Pagi Arengka ini, lanjut Dadang, akan memiliki panjang 425 meter dengan lebar 9 meter dengan dua jalur.³

3

<https://www.goriau.com/berita/baca/groundbre-aking-dua-flyover-di-pekanbaru-telah-dilakukan-pembangunan-proyek-pengurai->

Pada saat pelaksanaan proyek *flyover* tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan dari jadwal yang telah ditentukan. *Flyover* Pekanbaru Perempatan Mal SKA dipastikan tak selesai tahun 2018 ini. Kontraktor *flyover* Pekanbaru Perempatan Mal SKA butuh waktu setidaknya 2,5 bulan lagi menyelesaikan pekerjaan. Bila disebut *flyover* Pekanbaru Perempatan Mal SKA ini baru bisa diselesaikan paling cepat akhir Januari 2019.

Perwakilan kontraktor pembangunan *flyover* Pekanbaru di Perempatan Mall SKA, Sutrisno menuturkan tidak mungkin bisa menyelesaikan pembangunan *flyover* tersebut dalam waktu yang tersisa sebelum akhir tahun. Bahkan pekerjaan sudah dilakukan 100 pekerja lembur tiap malam hingga pukul 03.00 WIB subuh.

Sementara, waktu yang tersisa saat ini tinggal sekitar 1,5 bulan. "Kita butuh waktu setidaknya 2,5 bulan, kalau 1,5 bulan memang tidak terkejar. Tapi kalau sampai akhir Januari 2018 mungkin bisa kita selesaikan," kata Sutrisno dalam kesempatan itu.

Kontraktor juga menjelaskan, pihaknya meyakini proyek tersebut tidak bisa selesai sesuai jadwal yakni pada akhir Desember tersebut, karena diakuinya untuk melaksanakan satu sisi saja butuh waktu selama 6 bulan. Pihaknya juga sudah menghitung pada tanggal 20 November boks gilder mulai diangkat untuk dipasangkan dan itu butuh waktu 21 hari baru selesai, karena untuk dua gilder butuh tiga hari pemasangannya. Tanggal 20 Desember pemasangan gilder baru tuntas untuk ereksinya saja, sedangkan cornya

[kemacetan-ini-akan-dikerjakan-setahun.html](#). Diakses pada 1 desember 2019 Puukul 14.02 WIB).

jembatan belum bisa langsung dilakukan.

RIAUNEW.COM

Pekanbaru, Tahun 2018 mengatakan bahwa: “Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Yunnan Haris akhir pekan kemarin mengatakan, realisasi pembangunan flyover Pasar Pagi Arengka, sudah di angka 93 persen, sementara yang di Simpang SKA, 92 persen lebih.

“Memang agak terlambat. Lewat Desember kayaknya itu. Tapi kontraktor siap untuk didenda,” ujarnya. Saat ditanya apakah kontraktor pembangunan flyover Simpang SKA akan didenda juga, Yunnan menyebut bahwa masih dipertimbangkan. Pertimbangan ini tak lepas karena penyebab keterlambatan tak murni kesalahan kontraktor, namun juga dari pihak pemasok aramko, yakni baja setengah lingkaran untuk u-turn, datang tidak tepat waktu. “Harusnya datang pada Agustus kemarin. Tapi baru kemarin datangnya. Semua pembangunan flyover di Indonesia yang menggunakan aramko, terlambat semuanya karena pemasok. Jadi tidak hanya di Riau,” Yunnan menjelaskan.⁴

Dari hal tersebut pelaksanaan pembangunan flyover di pekanbaru yang terletak di Persimpangan Mall SKA dan Persimpangan Pasar Pagi Arengka tidak dapat diselesaikan tepat waktu, proyek yang seharusnya dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2018 ini baru dapat diselesaikan pada awal tahun 2019. Setelah melakukan pertimbangan dengan adanya penambahan masa hari kerja dan juga

denda kepada Kontraktor yang melaksanakan proyek tersebut.

Dari uraian diatas penulis menemukan beberapa fenomena dalam pelaksanaan pembangunan flyover yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Riau, dimana manajemen Dinas PUPR tidak berjalan dengan maksimal, sehingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian pembangunan flyover yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dapat diidentifikasi bahwa terdapat peran dari Dinas PUPR Provinsi Riau dalam pelaksanaan pembangunan flyover sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru. Berangkat dari kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk melihat atau meneliti terkait “**Manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau dalam Pembangunan Flyover di Pekanbaru pada Tahun 2018**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau (PUPR) dalam pelaksanaan pembangunan Flyover di Kota Pekanbaru pada tahun 2018?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembangunan flyover di Kota Pekanbaru pada tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi

⁴ <https://www.riaunews.com/spesial-riau/kota-pekanbaru/penyelesaian-dua-flyover-pekanbaru-terlambat-pupr-belum-pastikan-denda-pada-kontraktor/>. Diunduh pada 23 November 2019 Pukul 13.00 WIB).

Riau dalam pelaksanaan pembangunan *flyover* di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 dan,

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembangunan *flyover* di Pekanbaru pada tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya penelitian dibidang ilmu sosial dan ilmu politik dan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dan juga sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang membahas masalah yang sama.
- c. Bagi peneliti, adalah sebagai penelitian dan untuk memperluas serta memperdalam pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan.

KONSEP TEORI

A. Teori Manajemen Pemerintahan

Muhammad Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan diarahkan agar terlebih dulu mendefinisikan “hasil apa” yang ingin dicapai dengan uang, peralatan, keahlian, dan tenaga kerja yang dikerahkan. Ia berhubungan dengan target yang ingin dicapai oleh setiap unit dalam suatu periode tertentu.

Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan, dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Ryaas Rasyid (2000:150) Pelaksanaan manajemen pemerintahan mencakup beberapa bidang kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebijakan dan Program

Perencanaan kebijakan dan program kegiatan ini didahului oleh penelitian dan Analisa atas berbagai bidang permasalahan.

2. Pengorganisasian atas Struktur Pemerintahan

Pengorganisasian atas struktur pemerintahan yang mencakup upaya menjaga keserasian dalam hubungan antar departemen, membina keseimbangan antara otonomi dan integrasi, mengalokasikan program dan tanggung jawab secara vertikal dan horizontal, membina hubungan lini dan staff, memelihara hubungan antara kantor pusat dan unit-unit lapangan, memperbaiki jaringan komunikasi dan mendorong partisipasi.

3. Pengelola Keuangan

Pengelola keuangan yang mencakup penyeimbangan antara pembelanjaan dan penerimaan dalam proses penyusunan anggaran, pengalokasian uang dari hasil penerimaan ke unit-unit pemerintahan dan setiap tingkatan.

Pengawasan atas pelaksanaan anggaran, penerapan metode evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program dan ketaatan ada aturan yang berlaku, serta pendayagunaan anggaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemelihara stabilitas.

4. **Pembinaan dan Pengembangan Personil**
Pembinaan dan pengembangan personil yang mencakup penyeleksian calon, pengangkatan, penempatan, promosi, penegakan disiplin, dan pemberian insentif serta penghargaan. Dalam konteks pengembangan dilakukan pelatihan untuk pelayanan umum, pelatihan penjurangan, pelatihan teknis, dan pelatihan-pelatihan yang bersifat penyegaran. Penilaian atas prestasi unit kerja dan prestasi individual pegawai juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Ini dikembangkan dalam konteks kompetisi. Kepada mereka yang prestasinya tinggi, perlu diberi imbalan penghargaan dan promosi.
5. **Pengambilan Keputusan secara Umum**
Pengambilan keputusan secara umum berkenaan dengan pendefinisian masalah yang dihadapi, perumusan jalan keluar yang layak atas masalah, serta penentuan strategi untuk membangun dukungan bagi pemecahan masalah itu. Secara spesifik ia mencakup penentuan tujuan dan rencana untuk mencapainya, perumusan kebijakan, penugasan kepada siapa suatu kebijakan dipercayakan pelaksanaannya, penentuan strategi untuk pelaksanaan kebijakan, serta ketelitian dalam menaati prosedur administrasi dan hubungan hukum.
6. **Program Pengelolaan**
Program pengelolaan yang mencakup kepemimpinan, delegasi kewenangan, dan

penugasan-penugasan yang lebih spesifik kepada unit-unit dan pejabat-pejabat, serta koordinasi.

7. **Pengawasan Politik**

Pengawasan politik yang mencakup penegakan hukum, pertanggungjawaban publik, hubungan dengan Lembaga-lembaga perwakilan, dan kepedulian pada etika pemerintahan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen dinas PUPR dalam pembangunan *flyover* di kota Pekanbaru pada tahun 2018.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Alasan penulis meneliti di Kota Pekanbaru karena pada tahun 2018 di Kota Pekanbaru dilaksanakan pembangunan *flyover*, tepatnya di persimpangan Mall SKA dan persimpangan Pasar Pagi Arengka. Pembangunan *flyover* tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang pelaksanaan teknisnya dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah

wawancara yang dilakukan secara informal.

2. Sumber Data

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh. Adapun informan penelitian yaitu: Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi, Kepala Seksi, PPK dan PPTK Pembangunan *flyover* pada tahun 2018 di Pekanbaru.

3.4. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan informan-informan yang berkaitan dengan penelitian, berupa jawaban informan mengenai manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau dalam Pembangunan *Flyover* di Pekanbaru pada Tahun 2018.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer, antara lain:

- a. Peraturan Gubernur nomor 68 tahun 2016.
- b. Tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Provinsi Riau.
- c. Renstra Dinas PUPR Provinsi Riau tahun 2017-2019
- d. Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Provinsi Riau tahun 2018

3.5. Teknik Analisis Data

Cara mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau dalam Pembangunan *Flyover* di Pekanbaru pada Tahun 2018

Ryaas Rasyid mendefinisikan manajemen pemerintahan ada 7 (tujuh) variabel yang mempengaruhi manajemen pemerintahan yaitu:

3.1.1 Perencanaan Kebijakan dan Program

Perencanaan merupakan hal yang Dalam hal ini, perencanaan kebijakan dan program dalam pembangunan *flyover* di Pekanbaru pada tahun 2018 sudah tertera dalam Rencana Strategis (renstra) tahun 2017-2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Renstra ini merupakan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dalam pembangunan *flyover* di Pekanbaru tahun 2018.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut dalam program pembangunan jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau melaksanakan pembangunan *flyover* (jalan layang) di persimpangan pasar pagi arengka dan persimpangan Mall SKA, sebagai salah satu program untuk mendukung kebijakan yang tertuang dalam Renstra serta untuk mendukung RPJMD Provinsi Riau.

Pelaksanaan pembangunan kedua *flyover* tersebut terlaksana pada tahun 2018 dengan menyerap APBD murni provinsi Riau tahun 2018. Proyek

pembangunan *flyover* tersebut merupakan proyek dengan pengerjaan satu tahun anggaran sehingga di targetkan penyelesaian pembangunannya pada akhir tahun 2018. Tujuan pembangunan *flyover* tersebut sebagai salah satu alternative untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di kota Pekanbaru, dimana dikedua titik tersebut merupakan daerah yang rawan kmacetan lalu lintas terkhusus dihari-hari libur atau *weekend* hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Bapak Yunannaris :

“tujuan pembangunan flyover ini salah satunya untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di kota pekanbaru, dimana kemacetan yang terjadi paling parah itu di daerah persimpangan mall SKA dan persimpangan pasar pagi arengka terlebih ketika sudah memasuki hari libur atau akhir pekan banyak pendatang dari daerah lain. Untuk itu pembangunan flyover ini di perlukan selain unuk mengurangi kemacetan juga untuk mempermudah akses bagi masyarakat”

Beliau juga mengungkapkan :

”pembangunan flyover tersebut saya rasa sudah cocok dengan kultur masyarakat Kota Pekanbaru karena di Pekanbaru sendiri masyarakatnya rata-rata sudah memiliki kendaraan pribadi, dan memang sudah seharusnya ada penambahan fasilitas salah satunya ya pembangunan flyover. Dari tim survei kami pun juga sudah melihat bahwa di titik tersebutlah yang paling parah penumpukan kendaraannya sehingga menimbulkan kemacetan, terlebih di jam jam sibuk berangkat dan pulang kerja. “

Dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat dilihat bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau adalah mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Pekanbaru terutama pada titik persimpangan Mall SKA dan Persimpangan Pasar Pagi Arengka. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau menerapkan kebijakan pembangunan *flyover* di kedua titik tersebut sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau sebagai pelaksana teknis dalam pembangunan *flyover* tersebut.

3.1.2 Pengorganisasian atas Struktur Pemerintahan

Pengorganisasian atas struktur pemerintahan untuk pembangunan *flyover* di pekanbaru pada tahun 2018 yaitu dimulai dari Pengguna Anggaran (PA) dimana Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau selaku PA. Kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala Bidang pembangunan Jalan dan Jembatan selaku KPA dan PPK. Untuk pelaksanaan teknis di lapangan pembangunan *flyover* PPK dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai penanggung jawab penuh atas pembangunan *flyover* selama di lapangan. PPTK sendiri dipilih dari staff Dinas Pekeraan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang berkompeten dibidangnya melalui surat keputusan dari PA.

Keberhasilan pembangunan *flyover* tersebut dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi dari setiap struktur yang ada baik secara horizontal maupun vertikal, komunikasi dan koordinasi yang baik di setiap struktur akan menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan *flyover*, sehingga setiap target yang telah

direncanakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada pelaksanaan di lapangan penulis menemukan adanya indikasi bahwa komunikasi dan koordinasi antar struktur yang berjalan kurang baik. Antara pihak PPK dan PPTK memiliki pandangan berbeda mengenai waktu untuk penyelesaian pengerjaan proyek *flyover* tersebut. Namun dalam hal ini PPK memiliki kuasa penuh dalam penetapan kebijakan pelaksanaan pembangunan untuk dijalankan PPTK selaku pelaksana teknis di lapangan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ismail Ishak selaku koordinator lapangan pembangunan *flyover* Persimpangan Pasar Pagi Arengka, beliau mengungkapkan :

“kami udah mengajukan untuk pengerjaannya tidak hanya cuma satu tahun anggaran, karena menurut analisa kami proyek ini merupakan proyek yang besar dan tidak akan cukup jika hanya dikerjakan dalam satu tahun anggaran saja. Namun kami hanya pelaksana teknis disini dan yang memiliki kuasa penuh tadi ya PPK, PPK merasa anggaran yang ada itu memadai untuk dilaksanakan satu tahun anggaran namun untuk pengerjaannya kami masih kurang yakin jadi kami hanya mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh PPK tersebut”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sefrizon selaku PPTK *flyover* persimpangan Mall SKA :

“ . . .kami selaku PPTK hanya menjalankan keputusan dari PPK, dari awal kami sudah meminta untuk pelaksanaan proyek ini agar dilaksanakan secara multi years. . .”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai waktu pengerjaan proyek, PPK sebagai

pengambil keputusan dalam pengerjaan proyek *flyover* ini dinilai kurang cakap dalam mengambil keputusan, terlihat dari tidak melibatkan PPTK untuk menyusun kebijakan mengenai waktu pengerjaan proyek, ketersediaan anggaran yang memadai membuat PPK yakin untuk memutuskan pengerjaan proyek hanya dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Padahal PPTK memiliki tanggung jawab penuh atas penyelesaian proyek sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.1.3 Pengelolaan Keuangan

Tabel 3.1 Alokasi Anggaran Pembangunan *Flyover* Persimpangan Pasar Pagi Arengka dan Persimpangan Mall SKA Tahun 2018

No	Tahun	Program	Anggaran (Rp)
1	2018	Pembangunan <i>flyover</i> Persimpangan Pasar Pagi Arengka	78.398.668.000
2	2018	Pembangunan <i>Flyover</i> Persimpangan Mall SKA	159.384.265.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pagu anggaran yang disediakan melalui APBD Provinsi Riau tahun 2018 untuk pembangunan *flyover* di Persimpangan Pasar Pagi Arengka adalah Rp. 78.398.668.000 sedangkan untuk pembangunan *flyover* di Persimpangna Mall SKA pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 159.384.265.000.

Pagu anggaran yang disediakan oleh APBD Provinsi Riau untuk pembangunan *flyover* pasar pagi arengka sebesar Rp. 78.398.668.000 namun pemenang tender proyek *flyover* pasar pagi arengka yaitu PT. Dewanto Cipta Pratama pada proses pelelangan

menyanggungpi pelaksanaan pembangunan flyover dengan nilai kontrak sebesar Rp. 75.532.651.000 dari pagu anggaran yang ada. Dengan rincian penawaran sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	1.818.500.000,00
2	Drainase	
3	Pekerjaan tanah	75.77.200,00
4	Pelebaran perkerasan dan bahu jalan	
5	Pekerasan non Aspal	1.361.174.400,00
6	Perkerasan aspal	2.648.757.400,00
7	Struktur	61.723.577.910,00
8	Pengambilan kondisi dan pekerjaan minor	1.038.290.090,00
9	Pekerjaan harian	
10	Pekerjaan pemeliharaan rutin	
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		68.666.047.000,00
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% X (A)		6.866.604.700,00
(C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)		75.532.651.700,00
(D) Jumlah Total Harga Pekerjaan (C) Dibulatkan		75.532.651.000,00

Sumber: PT Dewanto Cipta Pratama

Nilai kontrak proyek *flyover* di Simpang Mall SKA senilai Rp 149.673.665.000 dari pagu anggaran Rp 159.384.265.000.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau juga telah meminta komitmen agar masing-masing kontraktor untuk menyelesaikan dua pembangunan strategis tersebut sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan proyek tersebut tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dan melebihi dari target yang telah ditetapkan, oleh karena hal tersebut pihak kontraktor dikenakan denda sebagai konsekuensi atas keterlambatan yang terjadi.

Denda yang diberikan kepada kontraktor dihitung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, yaitu nilai kontrak dikali 1000 per mil dan dihitung dengan penambahan hari yang diberikan. Yang kemudian denda itu akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Riau karena proyek tersebut menggunakan APBD murni Provinsi Riau tahun 2018.

3.1.4 Pembinaan dan Pengembangan Personil

Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dalam pembangunan *flyover* di pekanbaru pada tahun 2018 menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Sebagai KPA Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau mengatur untuk pendanaan pembangunan *flyover* di pekanbaru pada tahun 2018 yang berasal dari APBD, sedangkan sebagai PPK Kepala Bidang Pembangunan

Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau memiliki tugas menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa hingga penetapan kontrak dengan pihak kontraktor.

Selanjutnya Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan selaku Pengendali Kegiatan dan untuk teknis di lapangan dibantu oleh PPTK (Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan). Dalam pembangunan *flyover* di kota pekanbaru tahun 2018 terdiri dari dua PPTK yaitu PPTK untuk pembangunan *flyover* Persimpangan Mall SKA dan PPTK pembangunan *flyover* Persimpangan Pasar Pagi Arengka.

PPTK sebagai pelaksana teknis yang terjun langsung di lapangan tentunya harus memiliki keahlian di bidang yang ia kerjakan, untuk itu PA dalam memilih PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Sehingga nantinya PPTK yang terjun langsung di lapangan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.1.5 Pengambilan Keputusan Secara Umum

Pengambilan keputusan secara umum pada pembangunan *flyover* di kota Pekanbaru pada tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana proyek pembangunan *flyover* ini telah direncanakan sebagai proyek dengan kontrak tunggal yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau ini dilakukan dengan upaya penambahan waktu kerja untuk menyelesaikan proyek tersebut, selain itu denda juga diberikan kepada kontraktor yang dibayarkan sesuai dengan penambahan hari dan sisa pekerjaan proyek yang dikalikan 1/1000.

3.1.6 Program Pengelolaan

Mengenai prosedur pengelolaan pembangunan *flyover* di Pekanbaru pada tahun 2018, yaitu *flyover* di Persimpangan Pasar Pagi Arengka dan *flyover* Persimpangan Mall SKA, dimulai dari perencanaan yaitu berupa pembuatan DED (*Detail Engineering Design*) dimana anggaran untuk pembuatan DED tersebut masuk dalam APBD Perubahan 2017. Setelah DED selesai kemudian dilakukan pelelangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi penyedia barang/jasa yang dalam hal ini adalah pihak kontraktor yang akan melaksanakan proyek yang telah direncanakan. Setelah proses pelelangan maka akan didapatkan pemenang lelang dan dilakukan penandatanganan kontrak atas kesepakatan mengenai proyek yang telah direncanakan. Setelah itu dapat dilakukan pengerjaan fisik pembangunan proyek dimulai dari masalah perizinan dan pembersihan lokasi dari beberapa fasilitas/aset milik pemerintah yang terkena dampak dari pembangunan *flyover* tersebut.

Koordinasi yang dilakukan dalam pembangunan *flyover* di Pekanbaru pada tahun 2018 ini mencakup koordinasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau kepada pihak kontraktor selaku pelaksana pembangunan secara fisik. Koordinasi ini dilakukan agar perencanaan yang

telah dibuat sebelumnya dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Koordinasi tiap pihak dalam pembangunan *flyover* tersebut dilakukan agar penyelesaian pekerjaan ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau sesuai dengan kontrak. Namun adanya beberapa kendala dari pihak luar yang diluar dugaan sehingga menyebabkan keterlambatan.

3.1.7 Pengawasan Politik

Pengawasan politik yang mencakup penegakan hukum, pertanggungjawaban publik, hubungan dengan lembaga-lembaga perwakilan, dan kepedulian pada etika pemerintahan yang berlaku. Dalam hal ini pengawasan pembangunan *flyover* di Pekanbaru pada tahun 2018 dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Riau yang mebidangi masalah pembangunan.

Pengawasan dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Riau karena proyek ini menggunakan APBD Provinsi Riau tahun 2018, dalam hal ini DPRD hanya memperingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau sebagai pelaksana teknis agar dapat menyelesaikan pembangunan tepat waktu.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembangunan *Flyover* di Pekanbaru pada Tahun 2018

Keterlambatan proyek tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Perencanaan Program.
2. Koordinasi atas struktur Pemerintahan.
3. Program Pengelolaan Pembangunan *Flyover*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis merumuskan kesimpulan dari Manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Riau dalam pembangunan *flyover* di kota pekanbaru pada tahun 2018 mengalami keterlambatan. Hal tersebut karena adanya beberapa indikator manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik, yaitu :

- a. Perencanaan program pembangunan proyek *flyover* yang dilaksanakan satu tahun anggaran aalnya tidak disetujui oleh pihak DPRD Provinsi Riau, namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi riau yakin bahwa proyek bisa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pihak DPRD menyetujui jika proyek dilaksanakan dalam satu tahun anggaran namun pengerjaannya harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dimana setelah penetapan anggaran maka harus langsung dilaksanakan tender dan pembangunan.
- b. Dalam pengorganisasian struktur pemerintahan dalam hal ini PPK selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan kebijakan mengenai masalah proyek pembangunan *flyover* tersebut hingga penandatanganan kontrak dan mengeluarkan surat perintah kerja sementara itu PPTK sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang turun langsung di lokasi pembangunan fisik mengontrol jalannya pembangunan hingga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini PPK dalam perencanaan meyakini bahwa proyek tersebut

dapat selesai dalam satu tahun anggaran, namun pihak PPTK yang mengerti kondisi di lapangan merasa waktu yang diberikan kurang.

- c. Pada program pengelolaan pembangunan flyover juga ada beberapa kendala seperti jadwal pelelangan yang molor juga menyebabkan keterlambatan untuk memulai pengerjaan proyek tersebut dan keterlambatan pemasok bahan baku untuk pembangunan yang datang terlambat juga menjadi faktor keterlambatan penyelesaian proyek tersebut.

Proyek *flyover* tersebut baru dapat diselesaikan pada awal tahun 2019, hal tersebut setelah ada penambahan waktu penyelesaian proyek selama 50 hari kerja. Selain itu kontraktor yang melaksanakan pengerjaan *flyover* juga diberi denda karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu kontrak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka untuk bermanfaatnya penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau agar dapat melaksanakan manajemen proyek dengan baik dan mempertimbangkan setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi di lapangan.
2. Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan perencanaan terhadap program yang akan dilaksanakan dengan baik dan perlu menambah tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya, sehingga kedepannya proyek yang dilaksanakan tidak terkesan buru-buru.

3. Pihak DPRD seharusnya melakukan pengawasan rutin dan langsung menegur jika ada beberapa kendala yang akan berdampak besar dalam sebuah proyek.
4. Pihak kontraktor seharusnya dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan buruk, terkait bahan baku, jumlah tenaga kerja, dan waktu yang ditetapkan. Sehingga pada saat pelaksanaan minim adanya hal-hal yang diluar dari perencanaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bastian. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Hanafi, Mamduh M. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Keban. 2010. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna pemerintahan (tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

- Terry, George R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.
- Salam, Setyawan Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang:**
 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
- Karya Ilmiah:**
 Ayu Indraswari, Dara and -, Drs. Priyono, M.Si. (2019). *Analisis dampak pembangunan jalan layang (Flyover) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Guntur Dwi Saputra, Krisna. (2020). *Manajemen Pemerintahan Kabupaten Temanggung dalam upaya mengatasi kekeringan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.5, No. 1, 2020, 1-10.
- Hapsari, Tunjung. 2011. *Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah.
- Mustanir, A., & Jusman. 2016. *Implementasi Kebijakan dan Efektifitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Ilmiah Akmen, 13(3), 542-558.
- Posumah, Ferdy. 2015. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi, Vol.15 No. 02.
- Prasetyo R B., Firdaus M. 2009. *Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia*. Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan 2(2):222-236.
- Sumber-sumber lain :
<https://www.goriau.com/berita/baca/gro-undbreaking-dua-flyover-di-pekanbaru-telah-dilakukan-pembangunan-proyek-pengurai-kemacetan-ini-akan-dikerjakan-setahun.html>
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/07/03/pemprov-riau-gesa-pembangunan-flyover-simpang-ska-ded-masuk-apbd-perubahan-2017/#sthash.LSKAItwg.dpbs> (akses 01/12/19)
<http://riaumobile.com/2017/08/15/bangun-dua-fly-over-lagi-di-pekanbaru-pemprov-riau-anggarkan-rp-290-miliar/> (akses 01/12/19)
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/29/p3bif2366-dua-jembatan-layang-pekanbaru-dikerjakan-maret-2018> (akses 23/11/19)